

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data, sesuai dengan pendapat Sugiono (2002:58) pengertian objek penelitian sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tentang suatu hal objektif valid dan reliabel tentang suatu hal (varian tertentu)”.

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi nirlaba. Oleh karena itu yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang penulis akan teliti adalah organisasi nirlaba yang berada di daerah Jakarta.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance*. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, dimana dalam metode tersebut dibagi dalam metode deskriptif dan kuantitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Mudrajad Kuncoro (2001: 1) bahwa : “Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi, dimana pendekatan ini terdiri atas perumusan

masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisa hasil dan mengimplementasikan hasil.”

Metode kuantitatif bertujuan untuk membuat suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan antar variabel yang terlibat didalamnya.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah variabel dari prinsip-prinsip *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi serta partisipasi. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi nirlaba.

3.3.1 Akuntabilitas

Variabel pertama yang akan diukur adalah akuntabilitas. Meskipun semua prinsip sama pentingnya namun akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam prinsip *good governance*. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 hal yaitu Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Indikator dari prinsip akuntabilitas publik dibagi 2 tahapan yaitu¹:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
 - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program

¹ Dikutip dari secretariat good public governance (2003)

- c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

3.3.2 Transparansi

Variabel independen kedua yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Krisna P 2003;15). Indikator dari transparansi publik ini adalah

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab,
- b. Kemudahan akses informasi,
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar,
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa.

3.3.3 Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi

sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Indikator dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
- b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders
- c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

3.3.4 Kinerja Organisasi Nirlaba

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

Untuk menilai kinerja organisasi diperlukan indikator-indikator pengukuran secara jelas. Banyak pendapat yang berbeda-beda dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sebagai pedoman dalam menilai kinerja harus dikembalikan pada tujuan awal didirikannya organisasi.

Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja tidaklah semudah di sektor swasta. Bila dilihat dari tujuan dibentuknya organisasi publik yaitu memenuhi kepentingan publik bukan untuk mencari keuntungan. Pengukuran kinerja sektor publik terlihat mudah, namun dalam kenyataannya banyak pendapat berbeda dalam pengukuran kinerja organisasi publik.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Efisiensi. Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
2. Efektivitas. Apakah tujuan dari pendirian organisasi tersebut telah tercapai? Hal tersebut erat hubungannya dengan organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Ekonomi. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dari objek penelitian sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan dari penelitian itu sendiri.

Sumber data primer didapat atau diperoleh langsung dari responden. Para pegawai dari organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian akan menjadi responden penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner angket ke tiap organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian ini.

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah objek yang berhubungan dengan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi nirlaba yaitu organisasi yang berada di Jakarta. Sampel dalam penelitian ini pegawai yang berkerja di organisasi nirlaba tersebut.

Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria dari sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Kriteria Organisasi Nirlaba:

1. Telah Menerbitkan Laporan Keuangan
2. Laporan Keuangan Dapat diakses dengan mudah (Internet, Papan Pengumuman, dll)

Kriteria Responden:

1. Mempunyai pengalaman minimal 1 tahun di organisasi nirlaba.
2. Bagian yang mengurus keuangan.

3.6 Metode Analisis

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang menunjukkan tingkat pendidikan, lamanya bekerja dan usia

responden. Sedangkan untuk memberikan deskriptif tentang karakter variabel-variabel penelitian digunakan tabel distribusi yang menunjukkan *mean*, *median*, kisaran dan standar deviasi.

3.6.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan software *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghazali (2008) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold, 1985 dalam Ghazali, 2008) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, misalnya data harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi *unidentified model*.

Menurut Ghazali (2008) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran

yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* darivariabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator)diminimumkan.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikatagorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Ketiga adalah berkaitan dengan *meandan* lokasi parameter (nilai konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.

Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

3.6.3. Model Spesifikasi

Model dalam penelitian ini adalah struktural.Indikator pada penelitian ini bersifat reflektif. Berikut adalah konstruk refleksif dan formatif dari penelitian ini:

Tabel 3.1

Konstruk	Sumber	Dimensi		Indikator
Akuntabilitas (refleksi f) (A)	B, Guy Peter, 'The Politics or Bureaucracy', (2000). London: Routledge hal. 299-381. Dikutip dari secretariat <i>good governance</i> .	a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan (A1)	X1	Setiap kebijakan yang organisasi ini buat telah tersedia bagi pendonor
			X2	Para pendonor pada umumnya tidak mengetahui tentang kebijakan yang diambil organisasi ini
			X3	para pendonor dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan organisasi ini.
			X4	pendonor sulit untuk mengakses informasi keuangan dari organisasi ini.
		b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders (A2)	X5	Setiap keputusan yang telah dibuat organisasi telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
			X28	Setiap kebijakan yang dibuat organisasi ini tidak sesuai dengan tujuan pendornya
			X6	Setiap keputusan di organisasi ini telah sesuai dengan tujuan pendonor
(Martin Minogue, artikel "the management of public change; from 'old public administration' to 'new public management' dalam "law & governance" Issue I, British Council	c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku (A3)	X7	Setiap kebijakan yang telah dibuat organisasi ini telah sesuai dengan visi dan misi yang berlaku	

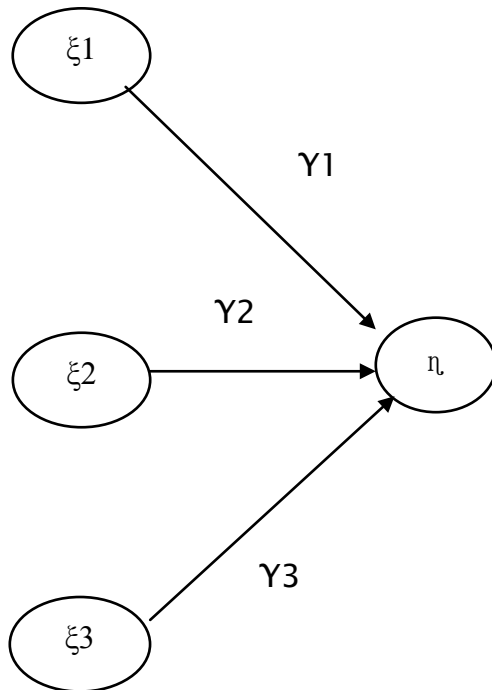
	Briefing.) Dikutip dari secretariat good governance.			
		d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi (A4)	X8	Organisasi ini mempunyai mekanisme pertanggungjawaban
(John W. Sutherland, "Management Handbook for Public Administrator, (1978), Van Nostrand Reinhold Company) Dikutip dari secretariat good governance.			X9	mekanisme kerja organisasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku di organisasi ini
	e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. (A5)		X10	setiap pencapaian target dari organisasi merupakan skala prioritas dari organisasi ini
(Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability Monitor Eastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul " Civil Society and Public Accountability) Dikutip dari	f. penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal (A6)		X11	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media papan pengumuman
			X12	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media internet, sehingga dapat diakses 24 jam

	secretariat good governance.	g. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program (A7)	X13	segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dilaporkan secara transparan		
	(Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia)	h. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat (A8)	X14	Organisasi ini telah mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses laporan keuangannya		
X15			setiap orang dapat mengakses laporan keuangan dari organisasi ini			
X16			akses untuk mengetahui laporan keuangan organisasi ini dibatasi			
Transparansi (refleksi f) (T)	Martin Minogue, Artikel "the new management of public change Dikutip dari secretariat good governance.	a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab (T1)	X17	Organisasi ini telah menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi		
			X18	Penerbitan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi		
	Transparency International Dikutip dari secretariat good governance.	b. Kemudahan akses informasi (T2)	X19	Akses untuk memperoleh dokumen laporan keuangan organisasi ini mudah diperoleh		
			Asian Development Bank, "Governance: Sound Development Management, 1999: hal 7-13) Dikutip dari	c. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa (T3)	X20	informasi mengenai laporan keuangan organisasi ini sulit untuk diakses
					X21	Laporan keuangan organisasi ini dapat dilihat di media massa
					X22	Laporan keuangan organisasi ini dapat di akses di media internet

	secretariat good governance.		X23	Informasi keuangan organisasi ini dapat diakses dengan mudah
Partisipasi (refleksi f) (P)	(Dr. Harmut Gustmann "public Participation in Public Service"	a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik (P1)	X24	Publik dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan dari organisasi ini
			X25	Laporan keuangan organisasi ini tersedia bagi publik
			X26	organisasi ini tidak mengizinkan pihak luar untuk mengakses laporan keuangannya
		b. Kemampuan Masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan (P2)	X27	Masukan-masukan dari pendonor dilakukan dengan baik
			X29	Organisasi ini mengadakan pertemuan rutin dengan para pendonornya
Kinerja Organisasi Nirlaba (formatif) (KO)	Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik	a. Efisiensi. Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. (KO1)	X30	pengelolaan anggaran organisasi ini memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep value for money.
			X31	efisiensi dan penghematan selalu dilakukan untuk tujuan organisasi
			X32	pemanfaatan sumber daya finansial digunakan bukan untuk tujuan organisasi ini
			X33	pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisien, pengeluaran terendah untuk mencapai tujuan.
		b. Efektivitas. Apakah tujuan dari pendirian organisasi tersebut telah tercapai? Hal	X34	pengelolaan dana dilakukan efektifitas, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil
			X35	sebagian besar pekerjaan tidak dilakukan dengan

		tersebut erat hubungannya dengan organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. (KO2)		prinsip efektifitas
			X36	sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan prinsip efektifitas
		c. Ekonomi. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal. (KO3)	X37	pengelolaan anggaran organisasi dilakukan ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
			X38	Organisasi ini telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.
			X39	Organisasi ini dalam menghimpun dana dan menggunakan dana selalu menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
			X40	value for money merupakan jembatan untuk mengantarkan organisasi menuju good governance

Model analisis jalur secara persamaan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

Berdasarkan model persamaan berikut maka dapat dirumuskan model persamaan sebagai berikut:

$$\eta = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \gamma_3\xi_3 + \zeta_1$$

3.6.4 Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala

pengukuran nilai *loading* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Sedangkan untuk menilai *reliabilitas model*, dipergunakan *composite reliability* dari suatu konstruk. *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach alpha* (Ghozali, 2011). Dibandingkan dengan *cronbach alpha*, ukuran *composite reliability* tidak mengasumsikan *tau equivalence* antar pengukuran dengan asumsi semua indikator memiliki bobot sama. Sehingga *cronbach alpha* cenderung *lower bound estimate reliability*, sedangkan *composite reliability* merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi parameter lebih akurat (Ghozali, 2011).

3.6.5 Inner Model

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011). Di samping melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *resampling* dan *bootstrapping*. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai *T-statistic* lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2011)